

PENGEMBANGAN PROTOTYPE SISTEM INFORMASI AKUNTANSI BERBASIS STANDAR AKUNTANSI ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) DI UMKM KABUPATEN BANYUMAS

Oleh:

Oman Rusmana, Warsidi, Sukirman, Drs. I Wayan Mustika

ABSTRAK

This research is intended to produce a model of social engineering through the development of SMEs accounting information system based Financial Accounting Standards Entities Without Public Accountability (SAK ETAP). SAK ETAP is the accounting rules issued by the Indonesian Institute of Accountants (IAI) to be applied by entities that are not publicly traded in the capital market, including SMEs and non-profit organizations. This research is an integral part of the mission of the Department Accounting Unsoed to carry out research and community service oriented to the development of public sector accounting, nonprofit, and SMEs. Research and community service related to rural information system has also been done before (Rusmana and Warsidi: 2011a; 2011b). Researchers managed to put together 4 Prototype accounting system for business services, merchandise business, manufacture, and agribusiness. Drafting system is driven by factors problems in the old system, the challenges of change in the external environment and the changing demands better in customer service. Prototype system of SMEs using better accounting documents by classifying transactions based on cash transactions, bank and non-cash transactions and non-bank as the main entry to the accounting system. In general, the researchers construct a prototype system of accounting for SMEs, in the following order, Overview SMEs, organizational structure and business processes of SMEs, Summary of Accounting Policies, Guidelines Accounts, Company Accounts and Format of Financial Statements, Standard Journal entries, Flowchart, Operation List and utilized forms. Although the outcome of case studies, prototype information system can be used by other organizations that have similiar characteristics business processes, both as a tool to improve governance and accountability of the management to stakeholders. In addition to the prototype system, this study will also produce output in the form of publications in international journals and teaching materials and laboratorium module of accounting information system providers service and non-profit organizations. This study uses a participatory action research methodology with the framework of the System Development Life Cycle (SDLC). Disperindagkop Banyumas as the partners have committed to provide the data and information needed and will implement its information system developed through this research.

Keywords: SMEs, SAK ETAP, accounting information system

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah Penelitian

Sebagai bagian dari proses konvergensi akuntansi dengan standar pada tataran global, Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI) meresmikan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada tanggal 17 Juli 2009. SAK ETAP mulai berlaku efektif tanggal 1 Januari 2011 (Wirahardja dan Wahyuni, 2009). Standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas (organisasi atau perusahaan) yang harus menerbitkan laporan keuangan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*), tetapi bukan merupakan perseroan terbuka yang sahamnya diperdagangkan di pasar modal dan bukan lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat dalam jumlah besar. Contoh pemangku kepentingan adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditor, dan lembaga pemeringkat kredit (IAI, 2009).

Istilah “tanpa akuntabilitas publik” yang digunakan oleh IAI untuk menamai standar ini lebih dimaksudkan untuk membedakan SAK ETAP dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) penuh yang merupakan hasil adopsi dari standar pelaporan keuangan internasional (*international Financial Reporting Standards – IFRS*). Berbeda dengan SAK ETAP, SAK penuh wajib diterapkan oleh perseroan terbuka (*go public*) yang sahamnya diperdagangkan di pasar modal dan oleh lembaga-lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat. Meskipun SAK ETAP pada awalnya dimaksudkan untuk diterapkan oleh usaha kecil dan menengah (UKM), dalam praktiknya badan usaha milik daerah (BUMD) seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), serta Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan organisasi nirlaba seperti rumah sakit, sekolah, dan perguruan tinggi swasta bisa menggunakan standar tersebut. Dengan kata lain, “tanpa akuntabilitas publik” dalam konteks SAK ETAP lebih menekankan perspektif keuangan. Suatu entitas bisa saja mempengaruhi hajat hidup orang banyak, seperti PDAM, atau menyediakan layanan vital bagi masyarakat, seperti rumah sakit dan sekolah, tetapi secara akuntansi digolongkan entitas tanpa akuntabilitas publik karena dana dan cakupan *stakeholders*-nya tidak signifikan (Warsidi, 2011).

SAK ETAP yang sebagian diadaptasi dari standar akuntansi internasional untuk UKM (*IFRS for SMEs*) sebenarnya merupakan penyederhanaan dari SAK penuh yang diadopsi dari standar pelaporan keuangan internasional (*full IFRS*). Penyederhanaan ini dimaksudkan untuk memudahkan administrasi keuangan UKM dan organisasi-organisasi nirlaba (IAI, 2009; Wirahardja dan Wahyuni, 2009; Martani, 2011), sehingga entitas-entitas itu dapat lebih berfokus pada pengembangan strategi bisnis dan peningkatan pelayanan, tanpa dibebani keharusan untuk mengikuti SAK penuh yang jauh lebih kompleks (Musnandar, 2011; Warsidi, 2011).

Akuntansi pada dasarnya merupakan sistem informasi yang memungkinkan pengelola organisasi (manajemen) dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk mengambil keputusan ekonomi secara rasional (Romney dan Steinbart, 2011). Adanya standar akuntansi “khusus” seharusnya memberikan peluang tersendiri bagi UKM dan organisasi-organisasi nirlaba yang memenuhi syarat untuk menerapkannya. Di masa lalu, standar akuntansi yang digunakan oleh perseroan terbuka (*go public*) sama dengan yang harus digunakan oleh UKM dan organisasi-organisasi nirlaba, ketika mereka diharuskan untuk menyusun laporan keuangan, misalnya sebagai persyaratan administratif yang diminta oleh pihak perbankan dalam pemberian pinjaman. Dengan adanya SAK ETAP yang mudah diterapkan, UKM dan organisasi-organisasi nirlaba seperti rumah sakit, sekolah, dan perguruan tinggi swasta akan mampu melaksanakan pengelolaan

keuangannya secara lebih transparan dan bertanggung jawab (Musnandar, 2011; Warsidi, 2011). Meningkatnya kualitas tata kelola dan pelaporan keuangan UKM dan organisasi-organisasi nirlaba pada gilirannya diharapkan akan meningkatkan akses entitas-entitas tersebut ke lembaga penyedia dana seperti pihak perbankan yang diperlukan dalam rangka peningkatan kapasitas dan daya saing.

Di sisi lain, penelitian yang benar-benar didedikasikan pada praktik akuntansi di UKM dan organisasi-organisasi sektor publik masih sangat jarang dilakukan. Penelitian akuntansi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh tradisi yang berkembang di Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada yang lebih berfokus pada praktik akuntansi di perusahaan-perusahaan besar dan berorientasi ke pasar modal, seperti halnya tradisi riset akuntansi di Amerika Serikat (Rusmana, 2011). Sehubungan dengan hal tersebut, tidak mengherankan jika produk-produk penelitian akuntansi UKM dan sektor publik masih sangat terbatas, termasuk yang menyoroti kemunculan SAK ETAP.

Kajian-kajian terkait SAK ETAP yang ada sejauh ini sebatas studi normatif yang membandingkan SAK ETAP dengan SAK penuh (Wirahardja dan Wahyuni, 2009; Basyir, 2010). Penelitian empiris mengenai kesadaran/pengetahuan pengguna informasi keuangan serta kesiapan pengelola UKM dan organisasi nirlaba yang menjadi sasaran diberlakukannya SAK ETAP, pengujian kualitas dan konsekuensi ekonomik dari pelaporan keuangan UKM dan organisasi nirlaba, serta riset terapan yang dimaksudkan untuk mengembangkan model penerapan sistem pelaporan berbasis SAK ETAP dalam rangka peningkatan kapasitas dan daya saing UKM dan organisasi nirlaba, adalah isu-isu strategis yang seharusnya mendapatkan perhatian.

Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk mengembangkan prototype sistem informasi akuntansi berbasis SAK ETAP. Ditinjau dari karakteristik proses bisnisnya, praktik akuntansi dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu akuntansi jasa, akuntansi perdagangan, dan akuntansi pemanufakturasi. Pada kasus UMKM di Kabupaten Banyumas, maka industri agribisnis merupakan industri yang penting untuk dipertimbangkan. Pada tahun pertama, studi kasus akan dilaksanakan di UMKM Kabupaten Banyumas dengan empat bidang industri, yaitu jasa, perdagangan, manufaktur dan agribisnis. Empat bidang bisnis dipilih karena bidang tersebut dikembangkan di UMKM Kabupaten Banyumas, dan merupakan 90% dari industri yang digarap di UMKM Banyumas.

Penelitian ini merupakan bagian integral dari misi penelitian dan pengabdian masyarakat Jurusan Akuntansi Unsoed yang diorientasikan pada pengembangan sistem informasi pada sektor UKM dan organisasi sektor publik (Rusmana, 2011). Di samping penelitian yang diusulkan melalui skema penelitian institusional ini, beberapa mahasiswa juga dilibatkan—sebagai bagian dari pelaksanaan tugas akhir mereka—untuk mengkaji kesadaran/pengetahuan pengguna informasi keuangan serta kesiapan pengelola UKM dan organisasi nirlaba yang menjadi sasaran diberlakukannya SAK ETAP. Sementara itu, aktivitas penelitian dan pengabdian masyarakat terkait pengembangan sistem informasi pemerintahan desa juga telah dilakukan (Rusmana dan Warsidi, 2011a; 2011b).

UMKM di Kabupaten Banyumas dipilih sebagai lokasi penelitian, karena lembaga tersebut memenuhi syarat untuk menerapkan pelaporan keuangan berbasis SAK ETAP. UMKM merupakan lembaga swasta penyedia barang dan jasa yang sangat vital bagi masyarakat, di mana pengembangan kapasitas dan daya saing menjadi isu yang sangat krusial. Berdasarkan wawancara awal dengan petugas dari Disperindagkop Kabupaten Banyumas, penyelenggaraan pembukuan di UMKM belum memenuhi syarat untuk terbentuknya UMKM yang berdaya saing dan masih dilaksanakan dengan berbasis kas (*cash basis*). Lebih lanjut, sumber daya manusia yang menguasai akuntansi di UMKM

Kabupaten Banyumas juga sangat terbatas, sehingga laporan pertanggungjawaban keuangan pun terpaksa disusun dengan melibatkan jasa perbankan untuk tujuan kredit dan hal lain juga disesuaikan. Sehubungan dengan kendala dan keterbatasan tersebut, pihak Disperindagkok Kabupaten Banyumas bersedia untuk menjadi mitra dalam penelitian ini melalui penyediaan data dan informasi yang relevan serta bersedia untuk menerapkan luaran penelitian ini sejauh dipandang layak (*feasible*).

Lebih lanjut, pengembangan prototype sistem informasi UMKM saat ini merupakan tahap pertama dari penelitian multi-tahun terkait pengembangan model penerapan SAK ETAP. Tahap kedua penelitian akan diarahkan pada pengembangan model penerapan SAK ETAP untuk pengelolaan data akuntansi secara on line real time.

Perumusan Masalah Penelitian

Mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi organisasi UMKM Kabupaten Banyumas, dalam penyelenggaraan administrasi keuangan dan implementasi SAK ETAP. Berdasarkan ulasan literatur pada Bab II, kendala utama yang dihadapi UKM di negara berkembang adalah terbatasnya sumber daya manusia dan sumber daya pendanaan (Correa-Cortes, 2008). Melalui penelitian ini, validasi empiris dilakukan untuk melihat kendala-kendala apa saja yang dihadapi organisasi nirlaba di Indonesia khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan administrasi keuangan dan implementasi SAK ETAP.

Menemukan kebutuhan pengguna eksternal informasi keuangan (pemangku-pemangku kepentingan) organisasi nirlaba, khususnya di UMKM Kabupaten Banyumas, baik pengguna yang real/aktual maupun pengguna potensial. Berdasarkan ulasan literatur diketahui bahwa pengguna informasi keuangan UKM terutama adalah pihak kreditor (Musnandar, 2011) dan pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan organisasi (IAI, 2009; IASB, 2009). Di sisi lain, kritik-kritik yang disampaikan asosiasi profesi dan akademisi di berbagai negara menyatakan bahwa pengguna yang dituju oleh IASB lebih didasarkan pada asumsi a priori, tanpa melalui validasi empiris. Penelitian ini merupakan salah satu upaya validasi empiris untuk konteks organisasi nirlaba di Indonesia yang secara akuntansi memenuhi syarat untuk menerapkan SAK ETAP.

Menemukan kebutuhan-kebutuhan informasi keuangan dan nonkeuangan pengelola organisasi UMKM Kabupaten Banyumas, sebagai pengguna internal informasi akuntansi. Berdasarkan ulasan literatur dan observasi awal di lokasi penelitian, pengelola UKM dan organisasi nirlaba pada umumnya masih mengandalkan akuntansi berbasis kas dalam penyelenggaraan pembukuannya sehari-hari. Sistem-sistem aplikasi penunjang seperti penagihan customer/pasien dan point of sale umumnya didatangkan dari sumber luar. Sistem pengukuran kinerja belum berjalan secara optimal, dan keputusan manajerial seringkali diambil berdasarkan pertimbangan (*judgement*) pengelola yang sekaligus adalah pemilik (Musnandar, 2011). Penelitian ini dimaksudkan untuk secara partisipatif melakukan identifikasi potensi-potensi perbaikan tata kelola organisasi nirlaba, terutama di lembaga rumah sakit swasta, yang menyediakan jasa vital bagi masyarakat. Lebih lanjut, penelitian ini dimaksudkan untuk menjajagi peluang diterapkannya konsep Enterprise Resource Planning (ERP) pada institusi rumah sakit (GauravkumarKureel, 2010).

Mengembangkan prototype sistem informasi dan sistem pengelolaan keuangan dengan kerangka kerja System Development Life-Cycle (SDLC) untuk UMKM yang berbasis SAK ETAP. Pencapaian tujuan penelitian 1 – 3 di atas pada akhirnya dijadikan landasan untuk mengembangkan prototype sistem informasi dan sistem pengelolaan keuangan dengan kerangka kerja SDLC berbasis SAK ETAP. Mengingat prototype sistem tersebut dikembangkan berbasis riset dan melalui kajian yang komprehensif,

aplikabilitasnya diharapkan bisa diperluas pada organisasi-organisasi yang memiliki proses bisnis serupa.

Manfaat Penelitian

Dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan riset-riset akuntansi di Indonesia yang didedikasikan secara khusus pada pengembangan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan UKM dan organisasi sektor publik, termasuk di dalamnya organisasi nirlaba yang menyediakan jasa vital bagi masyarakat. Luaran utama penelitian ini juga sangat jelas, yaitu prototype sistem informasi berbasis SAK ETAP. Setiap sistem informasi selalu memiliki orientasi ganda, yaitu internal dan eksternal. Orientasi internal dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi, sedangkan orientasi eksternal diarahkan untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan serta meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan-perundang-undangan yang relevan dengan aktivitas organisasi (Romney dan Steinbart, 2011). Lebih lanjut, prototype tersebut diharapkan dapat digunakan langsung atau diadaptasi oleh organisasi-organisasi nirlaba yang memiliki proses bisnis serupa. Kontribusi riset ini sejalan dengan misi penelitian dan pengabdian masyarakat Jurusan Akuntansi Unosed.

Tinjauan Teoritis

Kemunculan SAK ETAP tidak bisa dilepaskan dari tren konvergensi akuntansi secara internasional menyusul pesatnya perkembangan pasar modal global. Indonesia telah berkomitmen untuk berpartisipasi dalam konvergensi akuntansi internasional tersebut dengan mewajibkan perseroan terbuka (*go public*) yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menyusun laporan keuangan dengan mengacu kepada *International Financial Reporting Standards* (IFRS) yang dikembangkan oleh *International Accounting Standards Board* (IASB), terhitung sejak tanggal 1 Januari 2012. Melalui konvergensi akuntansi internasional, laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia diharapkan meningkat kualitas informasinya dan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan perusahaan-perusahaan lainnya di seluruh dunia (Martani, 2011; Warsidi, 2011).

Seperti halnya IFRS *for SMEs* pada tataran internasional, diberlakukannya SAK ETAP di Indonesia didasarkan pada premis bahwa kebutuhan pelaporan keuangan UKM dan entitas-entitas lainnya yang tidak mengelola dana masyarakat dalam jumlah besar berbeda dengan kebutuhan pelaporan keuangan perseroan terbuka (IAI, 2009; IASB, 2009). Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tidak mengadopsi seluruh isi IFRS *for SMEs*, karena UKM dan “entitas tanpa akuntabilitas publik” yang ada di Indonesia secara teknis kriterianya bisa berbeda dengan yang digunakan oleh IASB. Meskipun demikian, kedua set standar tersebut —SAK ETAP dan IFRS *for SMEs*—didasari premis yang sama dan merupakan penyederhanaan dari IFRS penuh (Wirahardja dan Wahyuni, 2009; Martani, 2011; Warsidi, 2011).

Terkait dengan organisasi nirlaba seperti yayasan, LSM, rumah sakit, sekolah, dan perguruan tinggi, yang dimiliki oleh pihak swasta, Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI) sebenarnya telah menetapkan standar akuntansi tersendiri, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Akan tetapi, standar tersebut hanya mengatur tata cara pelaporannya saja, sedangkan aspek-aspek akuntansi lainnya, seperti pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan harus mengikuti standar-standar akuntansi yang lain (IAI,

2007). Lebih lanjut, dengan dikeluarkannya Buletin Teknis 6 tentang Keterterapan SAK ETAP untuk Entitas Koperasi dan Entitas Nirlaba, organisasi nirlaba diperbolehkan dan bahkan disarankan untuk menggunakan SAK ETAP (IAI, 2011).

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab I, penelitian akuntansi di Indonesia yang secara khusus didedikasikan untuk sektor UKM dan organisasi nirlaba sangat terbatas, termasuk yang menyoroti kemunculan SAK ETAP. Kajian-kajian terkait SAK ETAP yang ada sejauh ini hanyalah studi normatif yang membandingkan antara SAK ETAP dengan SAK penuh, dan untuk konteks internasional, antara IFRS *for* SMEs dengan *full* IFRS (Strouhal dkk., 2009; Wirahardja dan Wahyuni, 2009; Basyir, 2010; Jati dkk., 2011; Schutte dan Buys, 2011a).

Sehubungan dengan hal tersebut, literatur yang diulas dalam penelitian ini sebagian besar adalah studi empiris yang terkait dengan penerapan standar akuntansi internasional untuk UKM (IFRS *for* SMEs) yang dilakukan di berbagai negara. Seperti halnya IFRS penuh, IFRS *for* SMEs juga dikembangkan oleh IASB. Meskipun tidak sepenuhnya, kemunculan SAK ETAP yang berlaku di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dan sebagian besar diadaptasi dari IFRS *for* SMEs, sehingga kajian literatur mengenai penerapan IFRS *for* SMEs di berbagai negara tetap memiliki relevansi dengan penelitian ini.

Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pengembangan IFRS *for* SMEs yang menjadi cikal bakal SAK ETAP dimulai pada tahun 2004 ketika IASB menerbitkan naskah pembahasan (*discussion paper*) pendahuluan mengenai standar pelaporan keuangan untuk UKM. Pada tahun 2007, IASB menerbitkan dokumen yang berjudul, “*The Exposure Draft (ED) of International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities*” yang hanya mencakup kurang lebih 15% dari IFRS penuh yang berlaku bagi perusahaan besar yang sahamnya diperdagangkan di pasar modal (Schutte dan Buys, 2011b).

Kurang lebih lima tahun sejak diterbitkannya naskah pembahasan pendahuluan, IASB secara resmi mengadopsi draft terbuka (*Exposure Draft – ED*) IFRS *for* SMEs menjadi IFRS *for* SMEs (IASB, 2009). Pada tahun yang sama, Indonesia melalui DSAK – IAI juga mengadaptasi draft terbuka tersebut dengan meresmikan diberlakukannya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) (IAI, 2009). Dikatakan “mengadaptasi” karena DSAK – IAI tidak begitu saja meresmikan (mengadopsi) IFRS *for* SMEs menjadi SAK ETAP, tetapi dengan cara menyederhanakan lebih lanjut. Hal ini berbeda dengan SAK penuh yang memang merupakan adopsi seluruhnya dari *full* IFRS (Martani, 2011).

Menyikapi pengembangan standar akuntansi UKM pada tataran internasional, berikut ini dikutip beberapa komentar asosiasi akuntan dari berbagai negara. Asosiasi akuntan publik di Hong Kong (*Hong Kong Institute of Certified Public Accountants – HKICPA*) menyampaikan kritik terhadap pandangan pendahuluan IASB mengenai standar akuntansi UKM dan mendesak IASB melakukan survey untuk memastikan sejauh mana standar akuntansi tersebut berdampak terhadap biaya penyelenggaraan akuntansi yang harus ditanggung oleh UKM (HKICPA, 2004).

Komisi standar pelaporan keuangan asosiasi akuntansi Eropa (*European Accounting Association’s Financial Reporting Standards Committee – EAAFRSC*) memberikan komentar bahwa regulasi pelaporan keuangan yang dikembangkan oleh IASB sangat dipengaruhi oleh kebutuhan pengguna dalam tradisi tata kelola Anglo-Amerika, dan karena sebagian besar negara Eropa menerapkan model Kontinental, IFRS *for* SMEs tidak akan mempertimbangkan kebutuhan pelaporan UKM di Eropa (EAAFRSC, 2008; Zeghal dan Mhedhbi, 2006).

Sementara itu, asosiasi kantor akuntan publik Finlandia (*Association of Finnish Accounting Firms*, 2007) mengomentari IASB dengan menyatakan bahwa draft terbuka IFRS *for SMEs* masih berfokus pada kebutuhan pasar modal dan investor, sedangkan kebutuhan UKM sendiri terabaikan. Mereka menyimpulkan, karena draft terbuka IFRS *for SMEs* semata-mata hanyalah versi mini dari IFRS penuh, fokusnya masih didominasi oleh kebutuhan perseroan terbuka, sehingga masih terlalu kompleks (Schutte dan Buys, 2011b).

Asosiasi akuntan di Australia (*Institute of Chartered Accountants in Australia*, 2007) juga mengomentari IASB dengan menyatakan bahwa draft terbuka IFRS *for SMEs* terlalu kompleks bagi UKM di Australia. Asosiasi tersebut menyimpulkan bahwa pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan yang dibutuhkan oleh pemangku-pemangku kepentingan utama UKM tidak dipertimbangkan oleh IASB.

Kritik-kritik yang disampaikan oleh asosiasi-asosiasi profesi tersebut didukung oleh riset-riset empiris yang dilakukan oleh kalangan akademisi akuntansi di perguruan tinggi. Sebagai contoh, Schiebel (2007) menyimpulkan bahwa IASB tidak melaksanakan analisis empiris secara global dalam menetapkan isi draft terbuka IFRS *for SMEs*. Tanggapan-tanggapan terhadap draft tersebut sebagian besar berasal dari Inggris yang menjadi tempat kedudukan IASB sendiri. Lebih lanjut, jika tanggapan-tanggapan tersebut dikelompokkan menurut benua, 58% ternyata juga berasal dari Eropa.

Penerapan standar pelaporan global untuk UKM di negara-negara berkembang diyakini akan jauh lebih sulit (United Nations, 2008). Oberholster (1999) menyatakan bahwa keunikan tantangan dan keanekaragaman negara-negara berkembang tidak mungkin dapat diakomodasi oleh standar akuntansi internasional yang diadopsi oleh negara-negara yang bersangkutan. Simpson (2008) juga menyatakan bahwa IASB tidak mempertimbangkan keunikan dan tantangan yang dihadapi UKM di negara-negara berkembang. Istilah UKM (SME) dalam draft terbuka IFRS *for SMEs* mengacu kepada definisi UKM yang digunakan di Amerika Serikat sehingga belum tentu relevan bagi negara-negara berkembang (Simpson, 2008).

Sacho dan Oberholster (2008) menyimpulkan bahwa IFRS bukanlah solusi standar untuk semua atau “*one-size-fits-all*” untuk memenuhi tuntutan akuntansi di negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang sebelumnya tidak memiliki standar akuntansi yang dikembangkan sendiri, melainkan dipaksa oleh pemain-pemain pasar global untuk menggunakan standar akuntansi internasional, sehingga hasilnya mungkin sekali tidak sesuai dengan yang diharapkan (Sacho dan Oberholster, 2008).

Meskipun belum ada definisi yang sama mengenai negara berkembang (*developing countries*) untuk membedakannya dengan negara maju (*developed countries*), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan Indikator Pembangunan Manusia (IPM) sebagai ukuran tingkat pembangunan manusia di suatu negara. Negara-negara dengan IPM yang rendah hingga sedang dikelompokkan oleh PBB sebagai negara berkembang. Jika tanggapan-tanggapan terhadap draft terbuka IFRS *for SMEs* dianalisis menurut tingkat IPM, maka jumlah responden/komentator dari negara berkembang hanya mencakup 12% (Schutte dan Buys, 2011b).

Menurut Correa-Cortes (2008), UKM di negara-negara berkembang lebih disibukkan dengan tantangan-tantangan klasik seperti terbatasnya sumber pendanaan dan sumber daya manusia. Zeghal dan Mhedhbi (2006) menyatakan bahwa keputusan negara-negara berkembang untuk mengadopsi IFRS terutama dipengaruhi oleh (1) pertumbuhan ekonomi; (2) tingkat pendidikan; (3) tingkat keterbukaan terhadap dunia luar; (4) pertimbangan-pertimbangan budaya; serta (5) keberadaan pasar modal. Sehubungan dengan hal tersebut, IASB mungkin sekali tidak mempertimbangkan perbedaan dan

keunikan karakteristik UKM di negara-negara berkembang yang berbeda dengan UKM di negara-negara maju.

Berdasarkan paparan literatur di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan IFRS *for* SMEs yang menjadi cikal bakal diberlakukannya SAK ETAP di Indonesia telah banyak mengundang kontroversi, baik di kalangan praktisi, sebagaimana tercermin dari kritik-kritik yang berasal dari asosiasi-asosiasi profesi, maupun dalam literatur akademik.

Terkait dengan kontroversi tersebut, Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI) telah mengantisipasinya dengan tidak mengadopsi sepenuhnya isi IFRS *for* SMEs menjadi SAK ETAP, melainkan hanya mengadaptasi saja. Sebagaimana dinyatakan oleh Martani (2011), SAK ETAP merupakan penyederhanaan lebih lanjut dari IFRS *for* SMEs, ketentuan-ketentuan akuntansinya jauh lebih sederhana, lebih longgar, dan lebih mudah diterapkan.

Metode Penelitian Dan Teknik Analisis Data

Rancangan Penelitian

Penelitian terapan ini merupakan studi kasus yang dirancang dengan pendekatan riset aksi partisipatif, dengan menggabungkan penggunaan data kualitatif dan kuantitatif. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif murni yang menguji keterkaitan antar-variabel dengan menggunakan uji statistika, temuan penelitian studi kasus ini tidak dapat digeneralisasi. Validitas hasil penelitian terbatas pada kasus yang diamati saja. Meskipun demikian, prototype sistem informasi sebagai salah satu luaran penelitian ini tetap bisa diadaptasi oleh organisasi-organisasi lain yang memiliki karakteristik proses bisnis serupa.

Metodologi penelitian pada dasarnya merupakan strategi atau rencana tindakan yang mencerminkan metode-metode apa saja yang dipilih dan digunakan serta keterkaitannya dengan tujuan yang diharapkan melalui kegiatan penelitian (Crotty, 1998). Riset aksi partisipatif berakar dari paradigma teori kritis dan konstruktivisme yang secara operasional mengkombinasikan penggunaan data kualitatif dan kuantitatif.

Riset aksi partisipatif berupaya untuk memahami dan memperbaiki fenomena yang diteliti dengan cara mengubahnya. Inti dari kegiatan riset aksi partisipatif adalah penelitian dan refleksi diri yang dilakukan peneliti bersama-sama dengan pihak yang diteliti, sehingga kedua belah pihak bisa memahami dan melakukan perbaikan atas praktik atau fenomena yang diteliti. Proses refleksi diri secara langsung dikaitkan dengan tindakan (*action*), serta dipengaruhi oleh pemahaman mengenai sejarah, budaya, dan konteks lokal lokasi penelitian. Dengan kata lain, kedua pihak terlibat dalam hubungan sosial yang intensif (Baum, dkk., 2006).

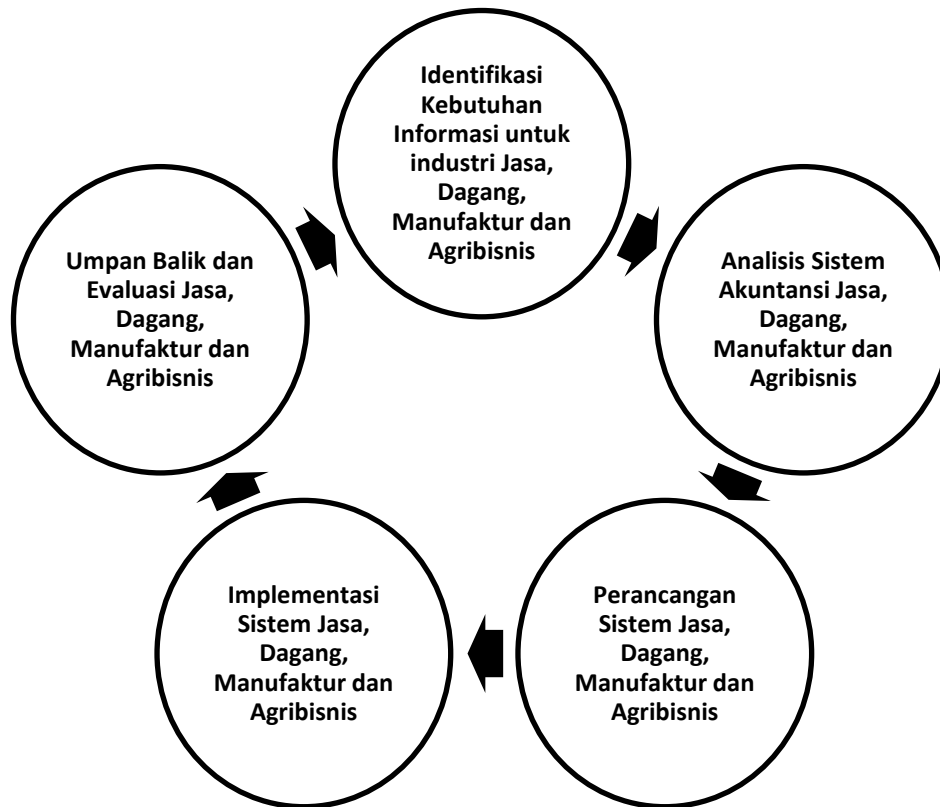
Secara spesifik, riset aksi partisipatif memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Riset aksi partisipatif berfokus pada penelitian yang tujuannya adalah memungkinkan dilaksanakannya tindakan (*action*). Tindakan dicapai melalui siklus reflektif, di mana pihak-pihak yang terlibat (peneliti dan yang diteliti) mengumpulkan dan menganalisis data, kemudian menentukan tindakan apa yang harus dilakukan. Tindakan yang dihasilkan diteliti lebih lanjut dan siklus reflektif pun berulang yang kembali mencakup pengumpulan dan analisis data, refleksi, dan tindakan.
2. Riset aksi partisipatif memberikan perhatian saksama terhadap hubungan-hubungan kekuasaan yang ada di lokasi penelitian, mengupayakan agar kekuasaan itu secara sengaja dibagi antara peneliti dengan yang diteliti: mengaburkan batas antara kedua belah pihak sehingga pihak yang diteliti juga menjadi peneliti. Dengan kata lain, pihak yang diteliti menjadi mitra dalam proses riset secara keseluruhan:
3. Riset aksi partisipatif tidak dimaksudkan untuk melepaskan data dan informasi dari konteksnya. Pihak-pihak yang terlibat tidak hanya diperlakukan sebagai “subyek” atau

“responden,” melainkan berpartisipasi secara aktif. Sejauh mana partisipasi aktifnya tentu saja tergantung pada kemauan mereka sendiri untuk terlibat dalam proses penelitian.

Pengembangan prototype sistem informasi sebagai luaran utama penelitian ini dilaksanakan dengan kerangka siklus hidup pengembangan sistem (*system development life-cycle* – SDLC). SDLC yang mencakup tahap-tahap sebagaimana digambarkan berikut (Romney dan Steinbart, 2011):

Gambar 1 Siklus Hidup Pengembangan Sistem



Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di UMKM yang menjadi binaan dari Disperindagkop yang berlokasi di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah.

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Data yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup semua fenomena yang ada di lokasi penelitian, mencakup informasi yang tertuang pada dokumen-dokumen yang relevan, tanggapan wawancara, tanggapan tertulis, dan bahkan setiap perilaku yang dapat diamati. Strategi untuk mengumpulkan data ditempuh melalui:

1. Studi literatur dan dokumen.
2. Observasi langsung, baik oleh peneliti maupun oleh mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan penelitian.
3. Wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung.
4. Diskusi kelompok terarah dengan pihak-pihak yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini secara formal dilaksanakan selama 4 bulan, dari bulan Mei 2015 sampai dengan Oktober 2015 sesuai dengan yang direncanakan. Meskipun demikian, interaksi antara tim peneliti dengan pihak mitra dalam rangka pengembangan sistem masih berlanjut hingga saat ini. Diskusi kelompok terarah dengan tim pengelola UMKM dilaksanakan setiap dua minggu sekali. Penelitian ini juga melibatkan dua orang mahasiswa yang secara intensif melaksanakan wawancara mendalam dengan responden individual, baik dengan tim manajemen maupun staf UMKM.

Gambaran Umum Kasus

Sebagaimana direncanakan, penelitian ini dirancang sebagai studi kasus UMKM secara fokus di Kabupaten Banyumas. Pengembangan Prototype Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Publik (SAK ETAP) untuk UMKM Industri Jasa, Dagang, Pengolahan, dan Agribisnis. Tabel 5.1 menunjukkan perusahaan yang menjadi tempat disusunya prototype Sistem informasi Akuntansi sebagai berikut:

Tabel 5.1
Jenis dan Nama UMKM dalam Penelitian

Jenis UMKM	Nama UMKM
UMKM Industri Jasa,	R3 Rental Mobil Arcawinangun
UMKM Dagang,	SPBU ARCAWINANGUN
UMKM Pengolahan, dan	TAHU SUMEDANG MANG EMAN TAMBAKSOGRA
UMKM Agribisnis	PEMBESARAN IKAN LELE “LATIF” KOTAYASA

Analisis Lingkungan Eksternal

Berdasarkan hasil serangkaian kegiatan *focus group* dan wawancara mendalam, disadari oleh kedua belah pihak—tim peneliti dan mitra—bahwa lingkungan bisnis sekarang semakin sangat kompetitif. Data dari Disperindagkop Kabupaten Banyumas menunjukkan terdapat sekitar 60.000 UMKM yang terdapat di 27 Kecamatan di seluruh Kabupaten Banyumas. Dengan total penduduk Kabupaten Banyumas yang berjumlah sekitar 1.456.947 (BPS, 2014), pangsa usaha ini perlu semakin ditingkatkan.

Khusus menyangkut pelaporan keuangan, asosiasi profesi akuntansi di Indonesia—Ikatan Akuntan Indonesia—telah mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba (PSAK 45) dan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang bisa diterapkan oleh entitas berskala usaha kecil dan menengah yang menyiapkan laporan keuangan bertujuan umum bagi pihak eksternal. Sebagaimana telah disinggung dalam Bab 2, UMKM memenuhi syarat untuk menerapkan SAK ETAP mengingat skala usahanya yang tergolong kecil dan menengah dan tidak termasuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan secara keuangan.

Berdasarkan analisis lingkungan eksternal tersebut, peluang dan tantangan yang dihadapi UMKM dalam kaitannya dengan pengembangan sistem informasi berbasis SAK ETAP dapat diringkas sebagaimana Tabel 2 berikut:

Tabel 2 Ringkasan Hasil Analisis Lingkungan Eksternal

Peluang	Tantangan
<ul style="list-style-type: none">• Jasa akuntansi yang disusun merupakan kebutuhan dasar dalam pengambilan keputusan• Dukungan yang kuat dari pelaku usaha.• Kemajuan Teknologi informasi yang berkembang dengan pesat• Standar pelaporan keuangan yang berpotensi menguntungkan	<ul style="list-style-type: none">• Persaingan ketat yang dipicu oleh banyaknya pesaing dan komersialisasi banyak aspek dari kehidupan• Tuntutan layanan prima dari pelanggan• Regulasi penyelenggaraan layanan konsumen semakin ketat dan cerdas• Implikasi perpajakan atas entitas nirlaba UMKM

Isu eksternal terkait fokus penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi peluang terkait standar pelaporan keuangan, terutama SAK ETAP, yang berpotensi untuk dimanfaatkan oleh UMKM dalam memenuhi kewajiban pelaporan keuangan kepada para pemangku kepentingan secara bertanggung jawab dan transparan. Sistem administrasi keuangan yang baik juga akan memiliki *side effect* berupa tersedianya alat (*tools*) untuk perencanaan pajak dan pelaporan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan.

Analisis Potensi dan Kendala Internal

Secara umum, UMKM diarahkan agar mampu bersaing dengan pihak asing karena adanya Masyarakat Ekonomi Asean. UMKM diarahkan untuk memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 pada tahun terhadap sistem manajemennya, produk, atau kemandirian pangan. Selain berdampak pada upaya untuk memaksa perbaikan sistem manajemen secara internal, diperolehnya sertifikat ISO 9001:2008 juga secara tidak langsung akan meningkatkan citra UMKM di Banyumas di mata para pengguna jasa (pelanggan dan calon pelanggan).

ISO 9001:2008 termasuk kategori standar ISO 9000 yang terkait dengan sistem manajemen kualitas dan dirancang untuk membantu untuk memastikan dipenuhinya kebutuhan pelanggan dan pemangku-pemangku kepentingan lainnya sekaligus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sertifikasi ISO 9001:2008 mengharuskan: (1) kebijakan kualitas dinyatakan secara formal oleh manajemen serta dikaitkan secara langsung dengan rencana bisnis dan pemasaran dan dengan kebutuhan pelanggan; (2) kebijakan kualitas dipahami dan dipatuhi pada semua level organisasi dan oleh seluruh karyawan; tiap-tiap karyawan bekerja dengan tujuan-tujuan yang terukur; (3) organisasi mengambil keputusan mengenai sistem kualitas berdasarkan data; (4) sistem kualitas secara rutin diaudit dan dievaluasi kesesuaian dan efektivitasnya; (5) catatan (sistem informasi akuntansi) menunjukkan bagaimana dan di mana bahan baku dan produk diolah sehingga memungkinkan produk dan problem ditelusuri sampai ke sumbernya; (6) organisasi menetapkan persyaratan dan permintaan pelanggan; (7) organisasi menciptakan sistem untuk mengkomunikasikan informasi mengenai produk, kontrak, pesanan, umpan balik, dan keluhan dengan pelanggan, serta menciptakan sistem untuk memenuhi permintaan informasi oleh pelanggan; (8) dalam mengembangkan produk baru, organisasi merencanakan merencanakan tahap-tahap pengembangannya serta melakukan pengujian pada tiap-tiap tahap; organisasi menguji dan mendokumentasikan apakah produk yang sedang dikembangkan memenuhi persyaratan rancangan, ketentuan perundang-undangan, dan kebutuhan pengguna; (9) organisasi secara rutin mengevaluasi kinerja melalui rapat-rapat dan audit internal; organisasi menetapkan apakah sistem kualitas bekerja

sebagaimana mestinya serta upaya perbaikan apa yang bisa dilakukan; (9) organisasi memiliki prosedur audit internal yang terdokumentasi; (10) organisasi menangani masalah yang sudah terjadi dan mengantisipasi potensi masalah; (11) organisasi memelihara catatan/rekaman aktivitas-aktivitas berikut keputusan-keputusan yang telah diambil serta memonitor efektivitasnya; (12) organisasi memiliki mendokumentasikan prosedur untuk menangani masalah ketidaksesuaian/ketidakpatuhan, baik yang telah terjadi maupun yang potensial, yang melibatkan pemasok, pelanggan, atau masalah internal; dan (13) organisasi:

1. Memastikan tidak ada pelanggan yang menggunakan produk/layanan yang jelek
2. Menetapkan apa yang harus dilakukan terkait produk/layanan yang jelek
3. Menangani akar masalah; dan
4. Memelihara catatan untuk digunakan sebagai alat (*tool*) untuk memperbaiki sistem.

Keharusan-keharusan tersebut mengharuskan UMKM di Banyumas untuk memiliki sistem informasi andal yang mampu menopang kepatuhan terhadap aturan dan standar yang berlaku, termasuk Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Aspek keunggulan lainnya di UMKM yang diteliti adalah sikap (*attitude*) tim manajemen puncak yang terbuka dengan perubahan (*open-minded*). Fakta ini terungkap dari kesediaan mereka untuk terlibat secara langsung dalam penelitian partisipatif dengan tim peneliti. Mereka juga terbuka dalam menerima mahasiswa yang dilibatkan dalam proses penelitian. Pelaksanakan *focus group* juga tidak selalu di lokasi penelitian, melainkan mereka yang justru berkunjung ke Fakultas Ekonomi Unsoed. Dalam konteks pengelolaan organisasi, sikap manajemen puncak tercermin dari komitmen untuk menggunakan luaran penelitian ini. Beberapa manajer menengah (kepala sub bagian) bahkan diikutkan dalam program pendidikan profesi dan peningkatan keterampilan di Fakultas Ekonomi Unsoed. Diperolehnya sertifikat ISO 9001:2008 juga tentu tidak terlepas dari sikap tim manajemen puncak yang terbuka. Satu poin penting (*critical*) dari sikap manajemen puncak dalam kaitannya dengan pengembangan sistem informasi adalah kesediaan mereka untuk merancang ulang (*redesign*) proses bisnis yang selama ini dijalankan.

Meskipun demikian, observasi lapangan serta wawancara dengan staf-staf kunci bidang keuangan dan akuntansi mengungkapkan bahwa secara umum sumber daya manusia yang ada dalam rantai nilai penunjang di UMKM Kabupaten Banyumas tidak memadai secara kualitas. Pada umumnya jika UMKM yang memiliki staf bagian akuntansi mengakui bahwa mereka tidak menguasai komputer, hanya menjalankan prosedur standar yang ditetapkan. Mereka tidak bisa mengirim e-mail, hanya menggunakan Internet untuk maksud hiburan, tidak bisa mengoperasikan aplikasi pengolah angka (*spreadsheet*) seperti Microsoft Excel sebagaimana mestinya. Ketika tim peneliti berinteraksi dengan staf data dan akuntansi, terungkap bahwa mereka juga belum sepenuhnya menguasai sistem akuntansi berpasangan (*double-entry accounting system*) yang merupakan ketrampilan dasar yang harus dimiliki oleh orang-orang yang menangani urusan akuntansi. Staf rekam medik (non-keuangan) juga memiliki kendala keterbatasan keterampilan yang serupa, di mana mereka hanya menjalankan apa yang selama ini menjadi prosedur standar. Meskipun demikian, salah satu faktor keunggulan mereka adalah kesediaan untuk terus-menerus belajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Salah satu wujud nyatanya adalah keikutsertaan banyak pelaku UMKM dalam program pendidikan profesi akuntansi dan pendidikan keterampilan perpajakan yang ada di Fakultas Ekonomi Unsoed.

Berdasarkan analisis aspek-aspek internal di atas, potensi dan kendala yang dihadapi UMKM di Kabupaten Banyumas dalam kaitannya dengan pengembangan sistem informasi berbasis SAK ETAP dapat diringkas sebagaimana Tabel 3 berikut:

Tabel 3 Ringkasan Hasil Analisis Internal

Potensi/Keunggulan	Kelemahan
<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Pemerintah terhadap penerapan SNI di UaMKM • Sikap pelaku UMKM terbuka terhadap perubahan • Kesiediaan pihak manajemen untuk melakukan <i>redesign</i> proses bisnis • Keterbukaan UMKM terhadap informasi keuangan yang sifatnya sensitif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia belum memadai untuk mengantisipasi perubahan • Budaya organisasi yang masih enggan (<i>reluctant</i>) terhadap hal-hal baru • Sikap puas diri terhadap capaian yang diperoleh

Berdasarkan hasil refleksi diri pelaksana UMKM bersama-sama peneliti, rencana aksi utama yang perlu diambil dalam mengatasi kendala yang dihadapi adalah pengembangan kapasitas.

Analisis Kebutuhan Informasi

Data dan informasi yang diproses dan dihasilkan oleh sistem informasi pada dasarnya dimaksudkan kepada dua kalangan pengguna, yaitu pengguna internal dan pengguna eksternal. Dalam konteks UMKM, pengguna eksternal yang dimaksud mencakup: (1) pemilik, (2) kreditor, yaitu bank dan lembaga keuangan lainnya; (3) pemerintah, yang meliputi Kantor Pelayanan Pajak, Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas dan Provinsi Jawa Tengah; (4) pemasok. Sedangkan pihak internal mencakup manajemen dan karyawan Pelaku UMKM.

Tabel berikut merinci kebutuhan informasi keuangan pemangku kepentingan Pelaku UMKM, baik eksternal maupun internal:

Tabel 4 Ringkasan Hasil Analisis Kebutuhan Informasi

Eksternal	Internal
<ul style="list-style-type: none"> • Pemilik <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengevaluasi kinerja dan pertanggungjawaban pengelola - Bentuk laporan: laporan keuangan bertujuan umum dan laporan-laporan penggunaan dana-dna khusus • Kreditor <ul style="list-style-type: none"> - Untuk menilai kelayakan dan risiko kredit, termasuk memberikan persetujuan pinjaman dan tingkat bunga - Bentuk laporan: laporan keuangan bertujuan umum. • Pemerintah <ul style="list-style-type: none"> - Untuk menentukan kewajiban 	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen <ul style="list-style-type: none"> - Untuk melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian, baik pada level strategis, taktis, maupun operasional - Bentuk informasi: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Anggaran pusat pertanggung jawaban ➢ Anggaran modal ➢ Laporan realisasi - Untuk perencanaan dan pelaporan kewajiban perpajakan • Karyawan <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mendukung kegiatan rutin - Informasi berupa data yang

perpajakan	terekam dalam formulir dan catatan
- SPT dan faktur pajak	
• Pemasok	
- Untuk menilai kelayakan dan risiko kredit dagang dan mengevaluasi kelangsungan usaha entitas	
- Bentuk laporan: laporan keuangan bertujuan umum	

Pengembangan Prototype Sistem

Perbaikan sistem manajemen UMKM secara integral diawali dari sistem informasi akuntansi. Karena, akuntansi adalah muara dari semua kegiatan bisnis UMKM seperti yang diungkapkan seorang pemilik UMKM:

“.....Karena sebetulnya di akuntansi, bagi mereka sebagai pendorong supaya data menyebar di bagian-bagian yang lain. Akuntansi sebagai alat untuk menyatukan data yang menyebar dan sinkronisasi antar bagian. Akuntansi adalah muara semua kegiatan bisnis...”

Perubahan ini akan menunjang pencapaian tata kelola teknologi informasi yang efektif. Weill dan Ross (2004, dalam Darmawati 2008) mengemukakan bahwa perusahaan dengan tata kelola teknologi informasi yang efektif akan menghasilkan profit 20% lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis. Oleh karena itu, sudah seharusnya hal ini menjadi perhatian khusus bagi UMKM. Berikut ini akan digambarkan munculnya sistem informasi akuntansi sebagai UMKM dengan menggunakan enam tahap implementasi Kwon dan Zmud (1987) sebagai kerangka kerja perubahan.

a. Tahap Inisiasi

Seiring dengan perjalanannya, Pelaku UMKM ingin menjadikan usahanya dengan pelayanan yang semakin lengkap. Hal tersebut juga kemudian memunculkan kompleksitas transaksi UMKM terutama transaksi keuangan. Kondisi internal yang terjadi bahwa sistem informasi manajemen untuk bagian keuangan dan akuntansi masih parsial dan tidak terintegrasi dengan sistem lain dalam organisasi.

Jika tahap inisiasi ini merupakan tanda pencarian solusi yang lebih luas, maka pembentukan tim perubahan sistem informasi akuntansi dengan tujuan melakukan studi kelayakan SIA merupakan awal tahap adopsi.

b. Tahap Adopsi

Tahap adopsi merupakan tahap pencarian solusi terdapat permasalahan yang muncul dalam tahap inisiasi. Pelaku UMKM menerima berbagai tawaran atas permasalahan dari berbagai pihak.

Jika entitas telah memutuskan pemilihan pemecahan masalah dan telah memutuskan investasi sumber daya untuk perubahan sistem, maka entitas menyiapkan tahap adaptasi perubahan sistem.

c. Tahap Adaptasi

Tahap adaptasi merupakan proses perubahan sistem dimana akan muncul banyak kebutuhan-kebutuhan yang tak terduga. Tahap adaptasi UMKM diawali dengan kunjungan konsultan untuk pembahasan kasus. Kunjungan awal ini diwadahi dalam forum rapat bersama pemilik.

Dari kejadian tersebut, pemilihan teknologi yang memungkinkan untuk level SDM dengan kondisi tersebut yaitu dengan menggunakan level manual yaitu aplikasi GL. Beberapa jenis aplikasi pun ada yang berbayar seperti program MYOB Accounting. Adapun aplikasi yang tidak berbayar seperti Zahir System, MAS Software, Accurate Accounting dan sebagainya.

Setelah melakukan berbagai pertimbangan dari segi kualitas SDM pengguna dan biaya, maka konsultan memutuskan untuk menerapkan *Pivotable Business Intelligence* melalui program *microsoft excel*. Karena keterbatasan kemampuan SDM untuk menjalankan akuntansi, maka diselenggarakanlah pelatihan mengenai pemahaman akuntansi dasar beserta praktek pelaksanaan *Pivotable Business Intelligence*.

Tahap adaptasi merupakan penyiapan sumber daya manusia yang harus mendapatkan transfer pengetahuan dari konsultan keuangan. Dan transfer pengetahuan tersebut diharapkan sumber daya manusia memiliki bekal yang cukup untuk tahap selanjutnya yaitu tahap penerimaan sistem baru.

d. Tahap Penerimaan

Indikasi pertama dari penerimaan UMKM terhadap sistem baru adalah dengan kemauan UMKM disusunkan sistem akuntansi pembuatan laporan keuangan perusahaan secara periodik (bulanan).

Tahap penerimaan merupakan tingkatan paling awal dari penggunaan dan pemeliharaan sistem baru yang membutuhkan keberlanjutan (Kwon dan Zmud, 1987). Dalam tahap ini, dapat diidentifikasi beberapa hal yang merupakan evaluasi pelaksanaan sistem di tingkatan paling awal. Di tahap ini pula, masih terdapat bimbingan-bimbingan teknis pelaksanaan akuntansi melalui bimbingan konsultan sebagai upaya pemeliharaan sistem baru yang belum mapan.

e. Tahap Rutinisasi

Tahap rutinisasi ditandai oleh penggantian secara menyeluruh pekerjaan-pekerjaan sistem lama dengan pekerjaan sistem baru (Kwon dan Zmud, 1987). Di UMKM, tahap rutinisasi diawali dengan perubahan sistem lama yang manual dan baru menghasilkan laporan arus pendapatan dan biaya menjadi sistem akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan perusahaan. Namun, penggunaan sistem akuntansi perusahaan belum bersifat menyeluruh. Dalam pelaksanaan *Billing System* yang meliputi sistem pendaftaran, penunjang dan kas masih menggunakan sistem lama.

f. Tahap Infusi

Jika penerapan sistem baru dinilai telah memenuhi syarat keamanan sistem, maka sampailah perusahaan pada tahap infusi. Tahap infusi bertujuan untuk memperbaiki efektifitas kerja dan terlihat berintegrasi dengan sistem organisasi yang lain (Kwon dan Zmud, 1987).

Dalam perjalanan perubahan sistem, banyak kendala-kendala yang bisa menjadi evaluasi untuk perbaikan masa yang akan datang. Seperti yang diungkapkan oleh pemilik UMKM:

“...banyak muncul kesulitan-kesulitan teknis seperti pivotable blank. Tidak link antara bb (buku besar-pen) dan neraca saldo. Harapan saya bisa link semua jadi real time...”

Efektifitas kerja sistem merupakan akumulasi evaluasi-evaluasi pada tahap-tahap sebelumnya. Pencapaian efektifitas sistem beriringan dengan pemeliharaan sistem. Pada akhirnya, sistem akuntansi akan berintegrasi dengan sistem-sistem organisasi yang lain.

Implikasi Konsep SDLC

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Pengembangan sistem di UMKM telah dimulai sejak pendirian usaha tersebut. Sistem informasi akuntansi dikembangkan menyertai sistem informasi yang lain.

Pengembangan sistem (SDLC) diperlukan untuk menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang ada hal ini di karenakan adanya permasalahan di sistem lama, pertumbuhan organisasi, meraih kesempatan, adanya instruksi. Realitas ini muncul di UMKM, terutama dorongan adanya permasalahan di persepsi terhadap sistem. Masalah pelaporan keuangan menjadi hal yang utama karena selama kurun waktu menjalankan usaha, UMKM tidak bisa menyajikan laporan keuangan sama sekali. Tidak mengetahui jumlas aset, kewajiban dan aset bersih dengan tepat. Kurang akuratnya pencatatan pendapatan dan beban.

Dengan telah dikembangkannya sistem yang di baru, maka diharapkan akan terjadi peningkatan-peningkatan di sistem yang baru. Peningkatan-peningkatan ini berhubungan dengan PIECES yaitu sebagai berikut :

Performa (kinerja), peningkatan terhadap kinerja (hasil kerja) sistem yang baru sehingga menjadi lebih efektif. Kinerja dapat diukur dari throughput dan response time. Throughput adalah jumlah dari pekerjaan yang dapat dilakukan suatu saat tertentu. Response time adalah rata-rata waktu yang tertunda diantara dua transaksi atau pekerjaan ditambah dengan waktu response untuk menanggapi pekerjaan tersebut. Information (informasi), peningkatan terhadap kualitas informasi yang disajikan. Economy (ekonomis), peningkatan terhadap manfaat-manfaat atau keuntungan-keuntungan atau penurunan-penurunan biaya yang terjadi. Control (pengendalian), peningkatan terhadap pengendalian untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan serta kecurangan-kecurangan yang dan akan terjadi. Efficiency (efisiensi), peningkatan terhadap efisiensi operasi. Efisiensi berbeda dengan ekonomis. Bila ekonomis berhubungan dengan jumlah sumber daya yang digunakan, efisiensi berhubungan dengan bagaimana sumber daya tersebut.

SDLC (System Development Life Cycle) adalah tahapan-tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh analis sistem dan programmer dalam membangun sistem informasi. Langkah yang digunakan meliputi :

Melakukan survei dan menilai kelayakan proyek pengembangan sistem informasi, mempelajari dan menganalisis sistem i nformasi yang sedang berjalan, menentukan permintaan pemakai sistem informasi, memilih solusi atau pemecahan masalah yang paling baik, menentukan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software), meran cang sistem informasi baru, membangun sistem informasi baru, mengkomunikasikan dan mengimplementasikan sistem informasi baru, memelihara dan melakukan perbaikan/ peningkatan sistem informasi baru bila diperlukan.

System Development Life Cycle (SDLC) adalah keseluruhan proses dalam membangun sistem melalui beberapa langkah. Dalam sebuah siklus SDLC, terdapat enam langkah. Jumlah langkah SDLC pada referensi lain mungkin berbeda, namun secara umum adalah sama. Langkah yang dilaksakan di UMKM dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Perancangan sistem

Tujuan perancangan sistem adalah untuk menentukan dan mendefinisikan sistem informasi apa yang akan dikembangkan sehingga dapat memberikan keuntungan dan nilai bagi

kegiatan bisnis secara keseluruhan. Perancangan sistem di UMKM melibatkan pihak yang terkait berupa peneliti dan pemilik UMKM.

b. Analisa sistem

Analisa sistem dapat didefinisikan sebagai pengguna dari suatu sistem informasi yang utuh kedalam bagian-bagian komponen dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan, sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikan. Tahap ini merupakan tahap yang kritis dan penting karena kesalahan pada tahap ini akan menyebabkan kesalahan pada tahap berikutnya. Langkah-langkah dasar yang harus dilaksanakan oleh analisis sistem yaitu :

1. Mengidentifikasi masalah
 2. Memahami sistem dan membatasinya
 3. Alternatif-alternatif apa saja yang ada untuk mencapai sasaran dan untuk memodifikasi atau mengubah sistem
- a) Pilih satu dari alternatif yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya
 - b) Implementasikan alternatif yang dipilih
 - c) Evaluasi masalah dari perubahan yang kita buat dalam sistem

c. Rancangan sistem

Alternatif yang telah dipilih dalam langkah analisa sistem merupakan dasar dari rancangan sistem. Rancangan sistem menentukan bagaimana suatu sistem akan menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Tahap ini menyangkut konfigurasi dari komponen-komponen perangkat keras dan perangkat lunak sistem sehingga setelah menginstalasi sistem akan benar-benar akan memuaskan spesifikasi sistem yang telah ditetapkan pada akhir analisa sistem.

d. Implementasi sistem

Tahap dari implementasi sistem adalah :

1. Membangun dan menguji jaringan database
2. Membangun dan menguji program
3. Instalasi dan menguji sistem yang baru
4. Penyerahan sistem yang telah dibuat

e. Perawatan dan pengembangan sistem

Diperlukan adanya kegiatan tambahan setelah sistem yang baru dijalankan, seperti merawat dan menjaga agar sistem tetap berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Perlu juga diperhatikan akibat adanya kebijaksanaan yang baru yaitu perubahan-perubahan prosedur, agar sistem tetap menjalankan fungsinya sehingga pengembangan sistem diperlukan.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil pelaksanaan penelitian ini menerapkan metodologi SDLC dalam penyusunan sistem akuntansi UMKM di Banyumas. Peneliti berhasil menyusun 4 Prototype Sistem akuntansi untuk usaha jasa, usaha dagang, usaha pengolahan, dan usaha agribisnis. Penyusunan sistem didorong oleh faktor-faktor masalah dalam sistem lama, adanya tantangan perubahan dari lingkungan eksternal dan tuntutan perubahan yang lebih baik dalam pelayanan pelanggan.

2. Prototype sistem UMKM menggunakan dokumen akuntansi yang lebih baik dengan mengklasifikasi transaksi berdasarkan transaksi kas, bank dan transaksi non kas dan nonbank sebagai entry utama terhadap sistem akuntansi.
3. Secara umum, peneliti menyusun prototype sistem Akuntansi untuk UMKM, dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Gambaran Umum UMKM, Struktur Organisasi dan Proses bisnis UMKM.
 - b. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi
 - c. Pedoman Akun, Penjelasan Akun dan Format Laporan Keuangan
 - d. Standard Journal entries
 - e. Flowchart, Operation List dan Formulir yang digunakan

B. Implikasi

Penelitian ini dapat memberikan implikasi kepada:

Luaran utama penelitian ini berupa prototype sistem informasi secara real memang dibutuhkan oleh pihak mitra. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, kegiatan pencatatan transaksi rutin masih dilaksanakan berbasis kas (*cash basis*) yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Sebagai akibatnya, ketika membutuhkan laporan keuangan yang mensyaratkan perlunya audit, misalnya sebagai salah satu persyaratan pengajuan pinjaman, mereka harus membayar pihak konsultan untuk mengkompilasi laporan keuangan. Sistem-sistem aplikasi tertentu, seperti sistem penagihan pasien (*billing system*), yang mendukung kelancaran pelayanan juga selama ini didatangkan dari sumber luar dengan biaya lisensi berkala yang sangat mahal. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, pihak mitra bersedia bekerja sama melalui penyediaan data, informasi, dan alat-alat yang dibutuhkan selama proses penelitian. Berdasarkan observasi dan wawancara pelaku UMKM, pihak mitra berharap bahwa hasil penelitian ini layak diimplementasikan karena dari segi biaya-manfaat diperkirakan akan lebih optimal.

Sebagaimana ditunjukkan dalam peta jalan penelitian yang telah kami laksanakan pengembangan sistem informasi berbasis SAK ETAP dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, transparansi, akses pendanaan dan daya saing UKM dan organisasi nirlaba masih akan berlanjut hingga tiga tahun mendatang. Pilihan ini konsisten dengan misi penelitian dan pengabdian Jurusan Akuntansi Unsoed yang diorientasikan pada pengembangan praktik akuntansi sektor UKM secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Basyir, S. 2010. Persiapan Penarapan SAK ETAP. *Newsletter Akuntansi, Audit, Perpajakan, dan Manajemen*, Edisi Juli. <http://www.russellbedford.co.id>. Diakses tanggal 20 Oktober 2011.
- Baum, F., C. MacDougall dan D. Smith. 2006. Participatory Action Research. *J Epidemiol Community Health*; 60 (10), hlm. 854 – 857.
- Correa-Cortes, A. 2008. SMEs in Developing Countries: Financial and Economic Factors that Affect Export Strategies. <http://www.monografias.com>. Diakses tanggal 27 Oktober 2011.
- Crotty. 1998. *The Foundations of Social Research: Meaning and Perspective in the Research Process*. NSW: Allen and Unwin.
- EAAFRSC. 2008. Comment on the IASB's Exposure Draft 'IFRS for Small and Medium-Sized Entities. *Accounting in Europe*, 5 (1),;hlm. 27 – 47.

- GauravkumarKureel. 2010. *ERP Implementation of IFRS for SMEs. Dissertation.* International School of Business & Media, India.
- Heck, J.L. dan J.E. Jensen. 2011. An Analysis of the Evolution of Research Contributions by the Accounting Review: 1926-2005. *Working Paper.* <http://www.trinity.edu>. Diakses tanggal 25 Oktober 2011, Trinity University.
- HKICPA. 2004. *HKICPA's Comments on the IASB Discussion Paper Preliminary Views on Accounting Standards for Small and Medium-sized Entities.* <http://www.hkicpa.org.hk>. Diakses tanggal Diakses tanggal 25 Oktober 2011. Hong Kong Institute of Certified Public Accountants.
- IAI. 2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45: Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.* DSAK – IAI.
- IAI. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).* DSAK – IAI.
- IAI. 2011. *Buletin Teknis 6: Keterterapan SAK ETAP untuk Entitas Koperasi dan Entitas Nirlaba.* DSAK – IAI.
- IASB. 2009. *International Financial Reporting Standard (IFRS) for Small and Medium-sized Entities (SMEs).*
- Institute of Chartered Accountants in Australia. 2007. *IFRS for Private Entities (formerly IFRS for SMEs).* <http://www.charteredaccountants.com.au>. Diakses tanggal 25 Oktober 2011.
- Jati, A., E. Suprpti, dan S. Wicaksono. Kajian atas Standar Pelaporan Keuangan Bank Perkreditan Rakyat : Komparasi Antara PSAK No. 31, SAK ETAP, dan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 1 (2), hlm. 141 – 150.
- Martani, D. 2011. Tiga Pilar Standar Akuntansi di Indonesia. *Makalah*, Seminar Nasional “IFRS dan Implikasinya bagi Pendidikan Akuntansi,” tanggal 1 Nopember 2011. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unsoed, Purwokerto.
- Musnandar, A. 2011. SAK-ETAP Membuat UKM Lebih Profesional. <http://www.uin-malang.ac.id>. Diakses tanggal 25 Oktober 2011. Universtas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Oberholster, J. 1999. Financial Accounting and Reporting in Developing Countries: A South African Perspective. *South African Journal of Economic and Management Sciences*, 2 (2), hlm. 222 – 239.
- Romney, M.B. dan P.J. Steinbart. 2011. *Accounting Information Systems*, Edisi 12, Pearson Education, Limited.
- Rusmana, O. 2011. Telaah Kritis atas Kurikulum Pendidikan Akuntansi di Indonesia. *Makalah*, Lokakarya Kurikulum Jurusan Akuntansi, tanggal 2 Nopember 2011. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unsoed, Purwokerto.
- Sacho, Z.Y. and J.G.I. Oberholster. 2008. *Factors Impacting on the Future of the IASB. Meditari Accountancy Research*, 16 (1), hlm. 117 – 137.
- Schiebel, A. 2007. *External users of SMEs' financial statements are different! Wild guess or sound empirical analysis?* <http://www.essec-kpmg.net>. Diakses tanggal 25 Oktober 2011.
- Schutte, D. dan P. Buys. 2011a. A Comparative Evaluation of South African SME Financial Statements against the IFRS Requirements. *Journal of Accounting and Taxation*, 3 (1), hlm. 008 – 022.
- Schutte, D. dan P. Buys. 2011b. A Critical Analysis of the Contents of the IFRS for SMEs - a South African Perspective. *South African Journal of Economic and*

- Management Sciences*, 14 (2), <http://www.sajems.org>, Diakses tanggal 25 Oktober 2011.
- Simpson, S. 2008. *Developing Countries' Views on Financial Reporting Standards for Small and Medium-Scale Enterprises (SMEs): The Case of Ghana*. <http://www.ssrn.com>. Diakses tanggal 26 Oktober 2011. Social Science Research Network.
- Strouhal, J., L. Müllerová, Z. Cardová, dan M. Paseková. National and International Financial Reporting Rules: Testing the Compatibility of Czech Reporting from the SMEs Perspective. *WSEAS TRANSACTIONS on BUSINESS and ECONOMICS*, 12 (6), hlm. 620 – 629.
- Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. BPFE – UGM.
- United Nations. 2008. *Accounting and Financial Reporting Guidelines for Small and Medium-sized Enterprises (SMEGA) – Level 3 guidance*. <http://www.unctad.org>. Diakses tanggal 26 Oktober 2011.
- Warsidi. 2011. Pendidikan Akuntansi dan IFRS. *Makalah*, Seminar Nasional “IFRS dan Implikasinya bagi Pendidikan Akuntansi” tanggal 1 Nopember 2011. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unsoed, Purwokerto.
- Wirahardja, R.I., dan E.T. Wahyuni. 2009. Perbedaan SAK ETAP dengan PSAK. *Akuntan Indonesia*, 3 (19), hlm. 34 – 37.
- Zeghal, D. dan K. Mhedhbi. 2006. An Analysis of the Factors Affecting the Adoption of International Accounting Standards by Developing Countries. *The International Journal of Accounting*, 41, hlm. 373 – 386.